

RESPON INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN CHINA DI PERAIRAN NATUNA

Kiki Rizky Laila Winarto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research analyzes “How Indonesia’s response to the threat of China in Natuna waters during the reign of Joko Widodo and what are the factors that influence it?”. This research uses a neorealist perspective by using rational choice theory and also several concepts like security and threat. This research shows that the Jokowi Government’s Era policy towards Chinese threats in Natuna waters is responded by increasing military capability and diplomacy. The enhancement of military capability aims to protect Indonesia’s sovereign rights in ZEEI Natuna waters from violations of foreign fishing vessels as well as Chinese claims based on nine dashed lines that coincide with Natuna waters territory. Besides, the idea to make Indonesia a world maritime axis shows that Indonesia must be active in protecting its fragile border areas due to claims among several countries. As “the honest broker” in the South China Sea, Indonesia also continues to promote diplomatic efforts aimed at maintaining its neutrality in the ownership disputes of features at the South China Sea and encouraging all claimant states to resolve their disputes in peaceful and non-violent ways.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang “Bagaimanakah respon Indonesia terhadap ancaman China di perairan Natuna pada masa pemerintahan Joko Widodo dan faktor apa sajakah yang mempengaruhinya?”. Penelitian ini menggunakan perspektif neorealis dengan menggunakan teori pilihan rasional. Adapun konsep yang digunakan antara lain konsep keamanan dan ancaman. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Era Pemerintahan Jokowi kebijakan terhadap ancaman China di perairan Natuna direspon melalui peningkatan kapabilitas militer dan diplomasi. Peningkatan kapabilitas militer bertujuan untuk melindungi hak berdaulat Indonesia di ZEEI perairan Natuna dari pelanggaran-pelanggaran kapal nelayan asing maupun klaim China yang didasarkan pada sembilan garis putus-putus yang berhimpit dengan wilayah perairan Natuna. Disamping itu gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menunjukkan bahwa Indonesia harus aktif dalam melindungi wilayah perbatasannya yang rentan terhadap konflik yang disebabkan oleh klaim antar beberapa negara. Sebagai “*the honest broker*” di LCS, Indonesia juga tetap mengedepankan upaya diplomasi yang bertujuan untuk menjaga netralitasnya terkait sengketa kepemilikan dari fitur-fitur di LCS dan mendorong seluruh *claimant states* untuk dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan tidak menggunakan kekerasan.

Kata Kunci: Natuna, ancaman China, peningkatan kapabilitas militer, diplomasi

PENDAHULUAN

Natuna merupakan pulau terluar dan terdepan Indonesia yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Perairan Natuna kaya akan sumber daya ikan serta migas. Sumber daya perikanan laut serta ladang gas di sebelah Utara Pulau Natuna (ZEE Indonesia) yang merupakan salah satu sumber terbebas di Asia menjadikan Perairan Natuna sebagai tujuan yang cukup menarik bagi investor asing. Sebagai bagian terluar dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan LCS, Perairan Natuna merupakan kawasan yang rentan dengan ancaman dari negara-negara pengklaim (*claimant state*) di LCS. Salah satu ancaman datang dari negara China. Pada tahun 2009 China secara sepihak menggambar sem-

bilan titik pada petanya yang ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Dalam peta yang dikeluarkan China pada tahun 2009 tersebut memuat sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang mengelilingi pulau-pulau dan perairan LCS. Sembilan garis putus-putus tersebut meliputi kira-kira 2.000.000 km² atau setara dengan 22% wilayah daratan China. Akan tetapi China tidak pernah menjelaskan secara gamblang mengenai lokasi koordinat geografis dari garis putus-putus tersebut.¹

¹ Fravel, M. Taylor, Juli 2016. ‘Traditional Fishing Grounds and China’s Historic Rights Claims in the South China Sea’. *Maritime Awareness Project Analysis* No. 31. Hal. 51-66

Sembilan garis putus-putus ini sebagai bentuk klaim China terhadap Laut China Selatan yang menjadi *overlapping-claims* terhadap beberapa kedaulatan wilayah negara lain disekitar perairan tersebut. Wilayah itu mencakup Kepulauan Paracel dan Spratly yang disengketakan, termasuk di dalamnya Scarborough Shoal dan sekelompok karang koral di dekat Filipina dan wilayah Perairan Natuna di bagian utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada tahun 2012 China mengeluarkan paspor baru dengan memuat peta yang memasukkan seluruh wilayah LCS ke dalam wilayahnya, termasuk di dalamnya sebagian dari perairan Natuna. Marty M Natalegawa (saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia) telah menyatakan keberatan atas paspor China yang mencantumkan klaim atas Laut Cina Selatan. Beberapa Negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina bahkan menolak untuk memberi stempel pada paspor tersebut karena beranggapan bahwa memberi stempel sama saja dengan mengakui klaim China.²

Pada November 2015 setelah adanya desakan dari Indonesia, akhirnya China menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak memiliki masalah mengenai kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna dan perairan di sekitar kepulauan tersebut yang berdekatan dengan wilayah LCS yang diklaim oleh China.³ Namun kondisi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai pernyataan China tersebut. Sepanjang tahun 2016 saja Indonesia dan China sudah beberapa kali mengalami ketegangan di sekitar perairan Natuna, terutama terkait persoalan wilayah penangkapan ikan. Berbagai ketegangan tersebut memperlihatkan tindakan yang provokatif oleh China terhadap Indonesia.

Klaim China yang ditunjukkan dengan sembilan garis putus-putus yang memicu ketegangan pada dasarnya tidak disertai oleh dasar

hukum yang jelas seperti hukum laut internasional yang digunakan oleh negara-negara anggota PBB. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB. Protes didasarkan pada wilayah ZEE Indonesia yang telah diatur berdasarkan UNCLOS. Berakhirnya kepemimpinan SBY yang digantikan oleh presiden Jokowi tidak terlepas dari upaya untuk melindungi Natuna dari ancaman China. Proteksi terhadap Natuna ini masuk ke dalam Sasaran Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2016.⁴

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan studi pustaka melalui data kualitatif yang merujuk kepada data kualitas objek penelitian atau serangkaian informasi verbal dan nonverbal untuk menggambarkan peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Berbagai informasi atau data yang dijadikan bahan analisis oleh peneliti untuk penelitian ini berasal dari berbagai buku, jurnal, dan artikel. Tulisan ini juga menggunakan salah satu perspektif utama dalam ilmu Hubungan Internasional yaitu perspektif neorealis yang disertai dengan konsep keamanan dan ancaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ancaman China di Perairan Natuna

China mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan (LCS) berdasarkan sejarah leluhurnya. Klaim China atas LCS tumpang tindih dengan wilayah ZEE Indonesia di Perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perairan dan kelautan. Klaim China dengan menggunakan sembilan garis putus-putus berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83.000 km² atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Negara-negara lain seperti Filipina dan Malaysia luas lautnya berkurang 80%, Vietnam 50 persen, dan Brunei 90 persen.⁵

² Connelly, L. Aaron, 2015. 'Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges.' *Contemporary Southeast Asia*. Vol.37, No. 1. Hal. 1-28

³ Dewi, Santi Nikumara, 2015. *Diancam Menko Luhut, China Akui Natuna Milik Indonesia*. Diakses dari Viva.co.id < <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/702670-diancam-menko-luhut-china-akui-pulau-natuna-milik-ri>> Diakses pada 17 Februari 2016

⁴ WIRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan) vol. 58, No. 42 Tahun 2016 <www.kemhan.go.id>

⁵ Haposan Napitupulu, "Peningkatan Kegiatan Hulu Migas di Laut Natuna mendukung Kedaulatan Wilayah NKRI", 15 Juli 2016, diakses dari <http://politik.rmol.co/read/2016/07/15/253249/Peningkatan-Kegiatan-Hulu-Migas-Di-Laut-Natuna-Mendukung-Kedaulatan-Wilayah-NKRI-> (19/11/2017)

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak berdaulat atas wilayah ZEE di Perairan Natuna. Ladang gas Natuna yang juga masuk ke dalam peta Cina juga merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu China juga menggunakan *Traditional Fishing Ground*-nya untuk memperbolehkan nelayannya melakukan penangkapan di ZEE Indonesia di perairan Natuna. Klaim tentang *Traditional Fishing Ground* tersebut berpotensi sebagai bentuk pengingkaran China terhadap status hukum perairan Natuna sebagai bagian dari perairan Negara Kepulauan Indonesia.

Selama tahun 2016, banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh kapal asing terutama kapal China. Pada tanggal 19-20 Maret, kapal patroli dari Departemen Perikanan dan Kelautan (KKP) Indonesia menangkap sebuah kapal nelayan China yang bermuatan 300 ton, Kway Fey 10.078, dan menangkap delapan anggota awak kapal yang menangkap ikan di ZEE Indonesia. Aksi patroli yang dilakukan oleh KKP Indonesia diintervensi oleh dua kapal penjaga pantai China. Kapal penjaga pantai China menabrak Kway Fey dan memaksa kapal tersebut untuk berhenti di dekat batas laut teritorial Indonesia.⁶

Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendeteksi pencurian oleh kapal China tersebut di titik 05°05,886'N, 109°07,046'E, di LCS yang masuk ke dalam wilayah perairan Natuna. Selain dari pada itu tindakan kapal penjaga pantai China tersebut melanggar *The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972* yang melarang kapal menabrak secara sengaja.⁷

Pada tanggal 28 Mei, pemerintah Indonesia berhasil menangkap kapal penangkap ikan China, Gui Bei Yu 27099. Kapal China tersebut melakukan *illegal fishing* di perairan yang sama

dimana kapal Kway Fey juga melakukan penangkapan ikan. Kapal Gui Bei Yu yang sempat kabur berhasil dihentikan oleh kapal perusak Indonesia Oswald Siahaan – 354 dan memblokir kapal penjaga pantai (*Coast Guard*) China. Jika sebelumnya kapal penjaga pantai China berhasil menyelamatkan Kway Fey, kali ini Angkatan Laut Indonesia berhasil dalam patrolinya karena Oswald Siahaan setara dalam ukuran dan kapasitasnya dengan kapal penjaga pantai China.⁸

Pada tanggal 17 Juni pembukaan Angkatan Laut Indonesia di Perairan Natuna memaksa kapal penangkap ikan China mematuhi tuntutan Indonesia untuk menghentikan operasinya dan mengizinkan pihak berwenang Indonesia untuk menahan kapal tersebut.⁹ Pada saat itu KRI Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli di perairan Natuna menerima laporan intai udara yang menyebutkan ada 12 kapal asing sedang mencuri ikan di perairan Natuna, dua diantaranya merupakan kapal penjaga pantai China.¹⁰

Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna

Wilayah perairan Natuna merupakan salah satu yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi terkait isu keamanan maritim. Posisi perairan Natuna yang terletak di LCS berpotensi terhadap hadirnya ancaman-ancaman akibat konflik antar beberapa negara di LCS. Keberadaan China di LCS menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia karena China mengklaim seluruh pulau-pulau kecil yang terdapat di LCS. Di sisi lain, peta China juga menunjukkan wilayah penangkapan ikan tradisional China yang tumpang tindih dengan ZEEI di perairan Natuna.

Permasalahan yang terjadi di perairan Natuna antara Indonesia dan China merupakan masalah perbatasan yang mengancam kedaulatan Indonesia di laut teritorialnya serta hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh menteri luar negeri Indonesia Retno

⁶ Shafiah Muhibat, "National Interests and the Role of Major and Middle Powers in the South China Sea: The Case of Indonesia", *National Asian Security Studies Program (NASSP) Issue Brief* No.4, 3 December 2016, Hal. 6

⁷ Natalia Santi, 25 Maret 2016, "Insiden Natuna, Ujian bagi Solidaritas Hubungan RI-China" <https://dunia.tempo.co/read/756961/insiden-natuna-ujian-bagi-soliditas-hubungan-ri-cina-15/12/2017>

⁸ Shafiah Muhibat, *op.cit.*, hal. 6

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Anggi Kusumadewi, 21 Juni 2016, "Kemelut Indonesia-China di Natuna Sepanjang 2016", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701164757-20-142477/kemhan-prioritaskan-anggaran-untuk-pangkalan-militer-natuna-07/01/2018>

Marsudi di dalam Nota Protesnya sebagai berikut:

- a. Terkait masalah pelanggaran hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di kawasan ZEE dan landas kontinen;
- b. Protes upaya yang dilakukan oleh Kapal Coast Guard Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen;
- c. Protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut territorial Indonesia.¹¹

Ancaman China di perairan Natuna direspon oleh pemerintahan Jokowi dalam bentuk peningkatan kapabilitas militer di Natuna, upaya diplomasi serta penamaan laut Natuna Utara. Pada tahun 2015 pemerintahan Jokowi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi sejumlah pejabat Kemhan dan TNI melakukan kunjungan ke Pulau Natuna untuk menindaklanjuti kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperkuat sarana dan prasarana pertahanan negara di wilayah Natuna. Menhan menyampaikan bahwa Kepulauan Natuna akan diperkuat dengan pembangunan pelabuhan untuk Pangkalan TNI AL dan memperlebar landasan pacu Pangkalan TNI AU.¹² Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/ 1255/M/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa Natuna menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana pengamanan di pulau-pulau kecil terluar/terdepan.¹³

Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 kepada DPR RI sebesar Rp104 triliun hingga Rp107 triliun. Kementerian Pertahanan – bersama Kepolisian Republik Indonesia – juga mendapat tambahan pagu (batas tertinggi) anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

¹¹ Butje Tampi, “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 10, Juli-Desember 2017, hal. 7

¹² Kemenhan RI, “Kunjungan Menteri Pertahanan ke Natuna untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Wilayah Terdepan” di dalam *Majalah Wira*, Vol. 57, No. 41, November-Desember 2015

¹³ Kemenhan RI, 2015, “Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/ 1255/M/2015 Tentang Kebijakan Pertahanan Republik Indonesia” Jakarta: Kemenhan RI¹⁴ Prima Gumilang, “Kemhan Prioritas Anggaran untuk Pangkalan Militer Natuna” 1 Juli 2016.

Alokasi anggaran Kemhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016. Anggaran pertahanan keamanan tidak hanya ditujukan bagi Menhan dan Polri, tetapi juga dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Kondisi daratan Natuna saat ini sudah tersedia 1 brigade kombatan gabungan yang terdiri dari 1 batalyon raider, 1 batalyon arhanud, 1 skuadron Penerbad, 1 batalyon marinir dan 1 batalyon paskhas serta sejumlah alutsista seperti Oerlikon Skyshield, Pantsir-S1, AH-64E Apache, Mi-35P, MLRS Astross II, UAV dan seterusnya.¹⁵ Prioritas terhadap Natuna juga ditunjukkan pemerintahan Jokowi dengan pembangunan pangkalan militer secara besar-besaran yang sedang berlangsung saat ini. Pembangunan pangkalan militer bertujuan untuk memperbesar pangkalan udara dan laut yang sudah ada saat ini di kawasan perairan Natuna.

Realisasi kebijakan peningkatan kapabilitas pertahanan RI di perairan Natuna sudah berlangsung sejak tahun 2016. Berdasarkan masterplan proyek pembangunan pangkalan TNI Terpadu di Natuna akan dijadikan Mako Batalyon Komposit. Batalyon ini memiliki kekuatan 1 Kompi yang merupakan ex Kompi C 138/TS yang terletak di Desa Sepempang. Pangkalan militer ini akan ditempatkan pula Sisdalops TNI Terpadu, Mess prajurit integratif, dibangun hanggar pesawat dan heli integratif, rumah sakit integratif. Dari segi kekuatan udara, pangkalan ini terdapat hanggar skuadron *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), satrudal jarak sedang, perpanjangan runway, pembangunan taxiway, bunkers 5 pesawat tempur, satbak hanud. Pembangunan pangkalan militer yang sedang berlangsung di Natuna juga disertai dengan pengembangan *radar monitoring* dan dermaga di beberapa desa di Natuna.¹⁶

¹⁵ Andari Widanto Fitriya Aisyah, “Laut Natuna, Salah Satu Bukti Kekuatan RI yang Semakin Membara” 20 Agustus 2017, diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/20/laut-natuna-salah-satu-bukti-kekuatan-militer-ri-yang-semakin-membara> (07/01/2018)

¹⁶ A. Ziyadi, “Rincian Alutsista Pangkalan TNI di Pulau Natuna”, 4 Oktober 2016. Diakses dari <http://militemeter.com/> (07/01/2018)

Upaya untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan militer di Natuna juga didukung melalui latihan perang yang berguna bagi personel TNI dalam menjalankan tugasnya yang termasuk dalam rangkaian penguatan pulau terluar. Selama pemerintahan Jokowi sudah dilakukan beberapa latihan tempur di Natuna, baik yang diselenggarakan oleh TNI AU maupun TNI AL seperti Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016¹⁷ dan Latihan Siaga Tempur Koarmabar 2017.¹⁸

Pemerintahan Jokowi ditengah usahanya dalam meningkatkan kapabilitas militer Natuna yang masuk dalam Sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Indonesia tahun 2016, tetap melakukan upaya diplomasi di Natuna. Indonesia berperan sebagai “*the honest broker*” di LCS. Indonesia memiliki kewajiban untuk terus menjaga netralitasnya terkait sengketa kepemilikan dari fitur-fitur di LCS dan mendorong seluruh *claimant states* untuk dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan tidak menggunakan kekerasan.

Gagasan Pemerintahan Jokowi tentang Wilayah Perairan Indonesia

Maritim Indonesia terkenal akan sumber daya kelautannya yang melimpah serta sejarah kejayaannya. Dengan adanya Deklarasi Djuanda tahun 1957, memberikan harapan baru bagi kejayaan Indonesia sebagai sebuah negara maritim sesuai dengan visi kelautan Indonesia era Jokowi yaitu sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam upaya perwujudan visi tersebut diperlukan adanya pembangunan yang berorientasi kelautan terutama pembangunan di wilayah perairan terluar yang menjadi pintu masuk bagi berbagai tindakan-tindakan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai

dengan kepentingan nasional Indonesia. Visi tersebut juga memperhatikan konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti *ASEAN Community*, *One Belt One Road (OBOR)* Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Act East* dari India dan *Re-Balance* dari Amerika. Dalam kaitan ini, visi Poros Maritim Dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian.¹⁹

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia artinya Indonesia bertanggung jawab atas segala keamanan dan perdamaian di wilayah maritim. Sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat terbuka dari berbagai arah, Indonesia memiliki sejumlah permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan hingga saat ini yang menjadi celah munculnya ancaman dari pihak luar terhadap wilayah perairan Indonesia.

Perhatian terhadap pulau-pulau terluar merupakan langkah penting untuk melindungi kedaulatan NKRI. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan ini karena Indonesia pernah mengalami ketegangan dengan beberapa negara tetangga terkait wilayah perbatasan yang menyebabkan hilangnya kedaulatan Indonesia atas beberapa pulau terluar. Permasalahan yang terjadi di Natuna merupakan ancaman nyata bagi Indonesia untuk memprioritaskan keamanan di wilayah tersebut karena rentan terhadap klaim-klaim negara lain.

Tantangan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Ancaman di Perairan Natuna

Kebijakan pemerintahan Jokowi di Natuna tentunya juga dihadapkan pada tantangan-tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia. Keberadaan Natuna yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat menyebabkan masyarakat di wilayah ini merasa kurang diperhatikan. Pembangunan yang tidak merata di Indonesia bisa menjadi salah satu alasannya.

¹⁷ informasi yang diperoleh dari <http://presidenri.go.id/> (07/01/2008)

¹⁸ Sucipto, “Puluhan Kapal Perang TNI Dikerahkan ke Natuna” 26 April 2017, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1200158/14/puluhan-kapal-perang-tni-dikerahkan-ke-natuna-1493145912> (07/01/2008)

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017: Kebijakan Kelautan Indonesia,

Pengamat hubungan internasional Alex Jemadu menilai, pemerintah perlu pemeratakan pembangunan, termasuk di daerah-daerah perbatasan, seperti di Kepulauan Natuna. Perhatian pemerintah terhadap masyarakat dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Pemerintah wajib membangun daerah perbatasan supaya penduduk di sana merasa memiliki Indonesia.²⁰

Tantangan terhadap Upaya pemerintah Indonesia dalam merespon ancaman China di perairan Natuna juga datang dari sikap pemerintah China itu sendiri. Pada penangkapan kapal Gui Bei Yu tahun 2016, di kamar kapten di atas kapal terdapat sebuah peta yang menunjuk bagian-bagian wilayah EEZ di Indonesia sebagai tempat memancing, yang disahkan oleh pemerintah China. Peta tersebut dikeluarkan oleh kantor kemaritiman Nansha 1994 yang mencantumkan perairan di pulau Natuna sebagai wilayah penangkapan tradisional China. Padahal tahun 1996 China sudah mengakui perairan Natuna yang merupakan ZEE Indonesia.²¹

Pemerintah China bahkan melindungi nelayannya yang mencuri ikan di perairan Natuna dengan alasan nelayan mereka melakukan penangkapan di wilayah penangkapan tradisional China. Keterlibatan pemerintah China juga terlihat dalam upaya kapal penjaga pantainya yang menghalang-halangi patroli yang dilakukan oleh KKP Indonesia di perairan Natuna. Seharusnya pihak China menghormati wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna karena sudah meratifikasi UNCLOS, namun sikap yang ditunjukkan China tidak demikian. China tetap menggunakan peta historisnya bahkan setelah mengakui Natuna menjadi bagian dari Indonesia. Sikap China seperti berusaha menegaskan klaimnya di LCS untuk memperluas cakupan wilayah negaranya. Sampai saat ini belum ada keterbukaan dari pihak China untuk menjelaskan latar belakang dari *nine dabs line* pada peta historis China tersebut.

²⁰ Edi Nasrul "Aksesibilitas Natuna Harus Ditingkatkan" 30 Maret 2016, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/03/30/o4u8p626-aksesibilitas-natuna-harus-ditingkatkan> (08/01/2018)

²¹ <http://www.dw.com/id/jokowi-kunjungi-natuna-isyarat-tegas-buat-cina/a-19349442>

SIMPULAN

Ancaman China di perairan Natuna merupakan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di laut teritorial Indonesia dan ancaman terhadap hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia. Respon Indonesia terhadap ancaman China di perairan Natuna Era Pemerintahan Jokowi dilakukan melalui peningkatan kapabilitas militer, upaya diplomasi dan penamaan Laut Natuna Utara. Pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan salah satu misinya membangun pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh. Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim, bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Artinya, Indonesia juga harus aktif dalam melindungi wilayah perbatasannya yang rentan terhadap konflik maupun ancaman yang disebabkan oleh klaim antar beberapa negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, Andari Widanto Fitria. 2017. "Laut Natuna, Salah Satu Bukti Kekuatan RI yang Semakin Membara". Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/20/laut-natuna-salah-satu-bukti-kekuatan-militer-ri-yang-semakin-membara> (07/01/2018)
- Berlianto, "China Tuntut Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara" 3 September 2017, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223> (11/01/2018)
- Tampi, Butje. "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis)", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 10, Juli-Desember 2017
- Trihartono, Agus. Ritsumeikan University, Kyoto-Jepang; Pengajar Hubungan Internasional dan Peneliti Institute Maritime Studies, Universitas Jember) dengan judul "Diplomasi (Megafon) di Natuna: Langkah Kuda Presiden Jokowi" 1 Juli 2016.